

**Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap
Penghindaran Pajak pada Perusahaan di Indonesia**

Mega Arisia Dewi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
megaarisiadewi@stiesia.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of good corporate governance on tax avoidance in companies in Indonesia. The mechanisms of good corporate governance in this study include managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, and accounting expertise background or audit finance committee. This study uses a sample of 48 companies listed on the Indonesia Stock Exchange, during 4 years of observation there were 192 annual reports analyzed. The sampling technique in this study was purposive sampling and the data analysis tool used in this study was multiple linear regression analysis. The results of this study are managerial ownership, institutional ownership, and independent board of commissioners do not affect tax avoidance. While the accounting or financial expertise background of the audit committee affects tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Expertise or Financial Background of the Audit Committee*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia. Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel 48 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selama 4 tahun pengamatan terdapat 192 laporan tahunan dianalisis. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Latar Belakang Keahlian atau Keuangan Komite Audit

PENDAHULUAN

Bertambah pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini, menyebabkan pemerintah mempunyai tuntutan yang lebih besar dalam membentuk semua potensi yang negara miliki menjadi pendapatan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. Satu di antara sumber pendapatan paling besar yang pemerintah terima yaitu pajak. Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan paling besar yang melebihi

70% penerimaan negara yang asalnya dari pajak yang diterima, oleh karena itu pendapatan nasional dapat ditopang oleh pajak (Devriadi & Achyani, 2023).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Fitriani & Sulistyawati, 2020).

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak yang berkewajiban membayar pajak yang dihitung dari laba bersih. Semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan dan pendapatan negara juga akan semakin banyak. Namun hal ini menjadi permasalahan bagi perusahaan karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Adanya perbedaan tujuan antara perusahaan dengan pemerintah dalam hal perpajakan menyebabkan sebuah pertentangan dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka menyejahterakan para pemangku kepentingan serta kelangsungan hidup perusahaan, sedangkan pemerintah mengharapkan penerimaan yang berasal dari pajak semaksimal mungkin. (Alam, 2019)

Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak badan atau perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah cara yang dilakukan perusahaan secara sah serta tidak bertentangan menggunakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan membebaskan biaya personal menjadi biaya bisnis, sehingga mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung mengurangi kredibilitas keterbacaan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. (Ariyani & Sunarto, 2024)

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang berisiko sehingga diperlukan kontrol yang baik agar tidak membawa kerugian bagi perusahaan. Buruknya *control* dari *principal* dapat membuat *agent* melakukan tindakan yang berisiko. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), karena GCG dapat memberikan bahan pertimbangan setiap keputusan maupun kebijakan yang akan diambil demi keberlangsungan perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan perusahaan. Dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan investor. (Amanda Wulansari & Pohan, 2024)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Penerapan *good corporate governance* yang terstruktur dengan baik akan membuat *agent* untuk mematuhi segala peraturan yang ada termasuk tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap tindakan penghindaran pajak. Tindakan ini bertujuan agar kinerja *agent* dapat mengalami peningkatan. (Ayu Widya Lestari & Putri, 2017)

TINJAUAN LITERATUR

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori agensi adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* sebagai pemegang saham sedangkan agen sebagai manajer. *Principal* mengontrak *agent* untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan. Dengan kata lain *principal* yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. (Gunawan et al., 2019)

Teori agensi merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Manajemen (*agent*) dalam menjalankan operasi perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan kemakmuran pemegang saham (*principal*), akan tetapi manajemen (*agent*) sering kali mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham (*principal*) sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Konflik ini biasa dikenal dengan *agency problem*. (Simanjuntak et al., 2021)

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan. (Sandy & Lukviarman, 2015)

Praktik penghindaran pajak sering memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari hukum pajak dan dalam kegiatannya tidak melanggar hukum perpajakan. Untuk melihat seberapa besar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yaitu dengan cara menilai seberapa besar perusahaan memanfaatkan kelemahan yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam melakukan penghindaran pajak, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang didapat yaitu perusahaan hanya mengeluarkan sedikit kas untuk membayar pajak sehingga jumlah kas yang dimiliki perusahaan akan tetap besar. Sedangkan kerugiannya yaitu mendapatkan sanksi dari fiskus pajak dan turunnya harga saham serta hilangnya reputasi perusahaan akibat audit. (Tahar & Rachmawati, 2020)

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik. *Corporate governance* dapat dikatakan baik apabila pengelolaannya telah berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* yang melakukan pengelolaan perusahaan di bawah hukum yang berlaku akan selalu berada di jalur prinsip-prinsip *good corporate governance* (Bucher & Rentsch, 2012). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu

kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan. (Saputra & Susanti, 2019)

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* (Winata, 2014), yaitu :

1. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)
2. *Transparency* (keterbukaan informasi)
3. *Accountability* (akuntabilitas)
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban)
5. *Independency* (kemandirian)

Adapun terdapat empat mekanisme dalam *good corporate governance* yang dipakai dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu:

1. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik saham perusahaan juga. Semakin banyak kepemilikan manajerial di suatu perusahaan akan menurunkan permasalahan keagenan karena pihak manajerial sebagai pihak agen juga berperan sebagai pihak prinsipal (Ariska et al., 2022).

2. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti reksa dana, asuransi dan bank, serta lembaga lain yang memiliki bentuk seperti perusahaan. Kepemilikan institusional biasanya memiliki persentase saham yang besar dalam sebuah perusahaan. Sehingga kepemilikan institusional memiliki peran yang besar dalam menentukan sistem dan kinerja perusahaan salah satunya adalah tindakan untuk melakukan penghindaran pajak (Chandra & Cintya, 2021).

3. Proporsi dewan komisaris independen

Komisaris independen adalah organ dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk mengawasi secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat untuk para direksi. Semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif (Claritus et al., 2023).

4. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit.

Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Keberadaan komite audit untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern (Subagiastra et al., 2017).

Perumusan Hipotesis

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh penghindaran pajak perusahaan

H₃: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan

H₄: Latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: Pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023. Kedua, perusahaan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) untuk periode 31 Desember 2020-2023 di dalam *website* Bursa Efek Indonesia. Ketiga, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Keempat, Perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai *good corporate governance* mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan komite audit dalam laporan tahunannya periode 2020-2023.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dan dikelola sedemikian rupa untuk keperluan penelitian, diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan tetapi diperoleh dalam bentuk data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia berupa data melalui internet (www.idx.co.id), dalam hal ini data keuangan perusahaan dari tahun 2020-2023.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

a. Penghindaran Pajak

Perusahaan menggunakan proksi pengukuran penghindaran pajak berupa *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR menjelaskan persentase antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari seluruh total pendapatan sebelum pajak dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang menjadi objek penelitian yang dalam ruangan lingkup penelitian diasumsikan tidak mempengaruhi faktor lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola, sehingga pihak manajemen sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang dikelolanya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Dengan rumus sebagai berikut :

$$KM = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki manajemen}}{\sum \text{saham beredar}}$$

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah presentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah saham yang beredar. Dengan rumus :

$$KI = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki institusional}}{\sum \text{saham yang beredar}}$$

c. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki kepentingan bisnis yang substansial dengan perusahaan, sehingga tidak dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Dengan rumus sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}}$$

d. Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit

Keberadaan komite audit diharapkan dapat melakukan pengawasan serta mengontrol manajer dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola perusahaan. Penelitian ini menyesuaikan dengan peraturan dari otoritas di Indonesia, yaitu BAPEPAM-LK, yang mengatur bahwa minimal 1 orang dalam komite audit memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{KeKA} = \frac{\sum \text{anggota yang memiliki latar belakang akuntansi/keuangan}}{\sum \text{anggota komite audit}}$$

Model Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif. Selanjutnya melakukan beberapa pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda.

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan komite audit terhadap penghindaran pajak. Hipotesis penelitian akan diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA_per = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 DKI + \beta_4 KeKA + e$$

Keterangan :

- TA_per = Penghindaran Pajak yang diukur menggunakan proksi CETR
- KM = Kepemilikan Manajerial
- KI = Kepemilikan Institusional
- DKI = Dewan Komisaris Independen
- KeKA = Latar Belakang Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit
- β_0 = Konstanta
- β_1 - β_4 = Koefisien Regresi
- e = Error

Persamaan regresi tersebut digunakan untuk menguji apakah mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM	192	,00	,27	,0408	,06941
KI	192	,02	,67	,2629	,15149
DKI	192	,00	,75	,3456	,14099
KeKA	192	,00	,33	,3057	,08735
TA_per	192	,00	,97	,2561	,18900

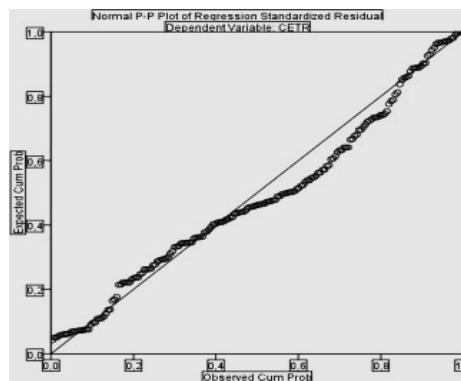
Sumber: Data diolah oleh peneliti dengan SPSS

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui jumlah pengamatan yang diteliti sebanyak 192 pengamatan, berdasarkan 4 periode terakhir laporan keuangan tahunan (2020-2023), dalam statistik deskriptif dapat dilihat nilai mean, serta tingkat penyebaran (standar deviasi) dari masing-masing tabel yang diteliti. Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa mean dari kepemilikan manajerial adalah 4,08. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 4,08% saham perusahaan dimiliki oleh pihak manajerial. Untuk kepemilikan institusional diketahui memiliki mean sebesar 26,29. Hal ini berarti bahwa 26,29% dari perusahaan sampel yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh institusi. Proporsi dewan komisaris independen mempunyai nilai mean sebesar 34,56. Hasil ini telah sesuai dengan peraturan dalam surat direksi nomor KEP-305/BEJ/07/2004 yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Komite audit mempunyai mean sebesar 30,57 hasil ini menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan cukup besar. Penghindaran pajak perusahaan mempunyai mean sebesar 25,61 hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang digunakan sebagai sampel memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Digunakan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak normal di dalam analisis regresi, yaitu dengan melihat penyebaran data atau titik berada di sekitar garis diagonal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah oleh peneliti dengan SPSS

Hasil uji *normal probability plot* menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Menunjukkan pola distribusi yang normal dan model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier yang sempurna diantara variabel-variabel independen dalam metode regresi. Multikolinieritas dapat

dideteksi dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) atau nilai TOL (*Tolerance*).

Tabel 2. Hasil Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KM	,967	1,034
	KI	,968	1,033
	DKI	,991	1,009
	KeKA	,992	1,008

a. Dependent Variable: TA_per

Sumber: Data diolah oleh peneliti dengan SPSS

Nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF *semuanya* kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Pendeteksian adanya autokorelasi salah satunya dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson, dengan kriteria sebagai berikut: (a) Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negative, (b) Angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, (c) Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,553

a. Predictors: (Constant), KeKA, DKI, KI, KM

b. Dependent Variable:

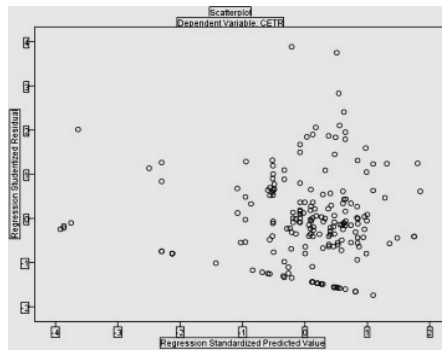
TA_per

Sumber: Data diolah oleh peneliti dengan SPSS

Hasil penelitian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,553. Dengan demikian model regresi yang akan digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi karena terletak diantara -2 dan +2.

Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* dilakukan dengan melihat pola grafik *scatterplot*. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data diolah oleh peneliti dengan SPSS

Berdasarkan grafik *scatterplot* yang dihasilkan hampir semua titik menyebar secara acak, tidak *membentuk* pola tertentu yang jelas, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui dampak variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan komite audit terhadap penghindaran pajak. Hasil regresi menyajikan informasi mengenai signifikansi statistik dari variabel-variabel independen dan persamaan prediktif untuk penggunaan ke depan.

Tabel 4. Hasil Uji T
Coefficients^a

Unstandardized		Coefficients		Standardized		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,076	,063		1,209	,228
	KM	-,223	,194	-,082	-1,150	,251
	KI	-,097	,089	-,078	-1,093	,277
	DKI	,178	,094	,132	1,881	,061
	KeKA	,502	,152	,232	3,304	,001

a. Dependent Variable: TA_per

Sumber: Data diolah oleh peneliti dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh terhadap perilaku

penghindaran pajak. Sehingga dengan demikian hipotesis 1, 2, dan 3 ditolak sedangkan hipotesis 4 diterima.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Nilai Adjusted R-Square Model Summary^b

Model	R	R Square	Std. Error of the Estimate	
			Adjusted R Square	
1	,288a	,083	,063	,18292
a. Predictors: (Constant), KeKA, DKI, KI, KM				
b. Dependent Variable: TA_per				

Sumber: Data diolah oleh peneliti dengan SPSS

Nilai adjusted R² sama dengan 0.063 yang berarti hanya 6,3% variasi dari penghindaran pajak (TA_per) dapat dijelaskan oleh mekanisme *goog corporate governance*, sedangkan sisanya sebesar 93,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,566	4	,142	4,230	,003b
	Residual	6,257	187	,033		
	Total	6,823	191			
a. Dependent Variable: TA_per						
b. Predictors: (Constant), KeKA, DKI, KI, KM						

Sumber: Data diolah oleh peneliti dengan SPSS

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,230 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), sehingga kesimpulannya model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan dalam penelitian. Dengan demikian model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tindakan penghindaran pajak perusahaan (TA_per).

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,251 > 0,05. Dan mempunyai t hitung < t tabel yaitu sebesar -1,150 < 1,973 artinya bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Jumlah kepemilikan manajerial yang relatif kecil yaitu dengan rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 4,08%, yang berarti bahwa dengan jumlah kepemilikan tersebut maka pihak manajemen dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan namun kepemilikannya belum cukup kuat

untuk membuat keputusan terkait perusahaan salah satunya dalam hal melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan dan adanya kepemilikan manajemen dalam perusahaan tidak menjamin manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Murtina et al., 2022) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional diperoleh signifikansi t sebesar $0,277 > 0,05$. Dan mempunyai t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $-1,093 < 1,973$ artinya bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecil kepemilikan institusional belum mampu menjadi alat *monitoring* yang efektif bagi perusahaan sehingga tidak dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dan mengurangi peluang terjadi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sunarsih & Handayani, 2018) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen diperoleh signifikansi t sebesar $0,061 > 0,05$. Dan mempunyai t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $1,881 < 1,973$ artinya bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan dan penambahan dewan komisaris independen oleh perusahaan dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* di dalam perusahaan, jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar belum sepenuhnya dapat mengendalikan terjadinya manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen yang akhirnya akan memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Santoso & Muid, 2022) mengemukakan bahwa proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit diperoleh signifikansi t sebesar $0,001 < 0,05$. Dan mempunyai t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $3,304 > 1,973$ artinya bahwa variabel latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan, salah satunya dalam hal melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan karena mereka lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara menghindari risiko deteksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih & Mildawati, 2016) menjelaskan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Meskipun secara teori, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen bisa memengaruhi penghindaran pajak, berbagai faktor yang lebih kompleks, seperti regulasi pemerintah, kebijakan internal perusahaan, dan kepentingan jangka pendek versus jangka panjang, bisa menjelaskan mengapa pengaruhnya tidak selalu signifikan. Penghindaran pajak sering kali lebih dipengaruhi oleh dinamika operasional internal, kebijakan fiskal negara, dan strategi pengelolaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1-22.
- Amanda Wulansari, A., & Pohan, H. T. (2024). Pengaruh Economic Disclosure Pada Sustainability Report Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 511-520. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20840>
- Ariska, F., Fionasari, D., & Dwi Aristi, M. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2065>
- Ariyani, S., & Sunarto, S. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 125. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3334>
- Ayu Widya Lestari, G., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028-2054.
- Bucher, P. O., & Rentsch, H. P. (2012). Kommentar zu: ICF-orientierte klinische

dokumentation und evaluation in der neurorehabilitation - teil 1 von claudia wendel und ellen schenk zu schweinberg / zeitschrift für neuropsychologie, 23 (2), 2012, 65-79. *Zeitschrift Fur Neuropsychologie*, 23(4), 251–253. <https://doi.org/10.1024/1016-264X/a000083>

- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Claritus, E., Sitinjak, N. D., & Harmono, H. (2023). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 74–82. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9488>
- Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness , Thin Capitalization , Political Connection , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2237–2250.
- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Solusi*, 18(2), 143–161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Gunawan, M. I., Mukhzarudfa, & Wahyudi, I. (2019). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013 - 2017. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(4), 1–100. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i4.8443>
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47–66. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66>
- Ningsih, W. F., & Mildawati, T. (2016). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN* Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 5(November), 1–16.
- Pasaribu, D., & Siahaan, S. B. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Manajemen*, 6(2), 139–148. <https://www.ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/141%0Ahttp://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/download/141/125>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 23(April), 74–79.

- Saputra, M. D., & Susanti, J. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *VALID Jurnal Ilmiah*, 16(2), 164–179.
- Simanjuntak, O. D. P., Syaghputra, H. E., & Purba, R. R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 58–73.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Sulistiana, I., & Istianingsih, I. (2018). Studi Negara Asean Pengungkapan Corporate Social Responsibility Mediasi Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(2), 357. <https://doi.org/10.35448/jte.v13i2.4323>
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163–185. <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.87>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Winata. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Journal Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11.